

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

Diana Sari Pratiwi¹, Ida Hayu Dwimawanti²

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of technology requires the government to adapt and innovate to support the realization of SPBE in accordance with Ministerial Decree Number 679 of 2020 and ANRI Regulation Number 4 of 2021. SRIKANDI is implemented to integrate archiving and mailing in one application but until now, the SRIKANDI system has not fully met the needs of users in the regional scope due to technical constraints so that correspondence and archiving are hampered. This study aims to analyze the Implementation of the SRIKANDI Policy at the Communication and Informatics Office of Central Java Province and the inhibiting factors of policy implementation with Edward III theory. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews and literature study. The results showed that the implementation of SRIKANDI was not in accordance with the technological and organizational dimensions. All indicators of system quality in the technology dimension are not appropriate, including the availability of SRIKANDI when needed, the response time of SRIKANDI when accessed, and the security of SRIKANDI for sending and storing data. The indicator of adequate support in the organizational dimension is not appropriate because the mechanism has not been clearly regulated. Factors inhibiting policy implementation include the bureaucratic structure due to the unavailability of SOPs and technical guidelines to detail the mechanism and authority to use SRIKANDI.

Keywords: *Archival Digital Innovation, Information System, Policy Implementation, Technology Dimension*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan TIK (Teknologi, Informasi, Komunikasi) berdampak pada kompleksnya kebutuhan masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan publik seperti pengambilan keputusan, penyajian data, mencari referensi dan solusi karena masyarakat menjadi lebih kritis terkait efektivitas serta efisiensi dari pemberian pelayanan publik oleh pemerintah. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan publik melalui peningkatan pelayanan di bidang TIK atau

disebut dengan *E-Government* sebagai bentuk perwujudan dari *good governance* serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Mohi & Botutihe, 2020).

Keberhasilan pengembangan dan penerapan *E-Government* dalam tata kelola pemerintahan Indonesia mampu menangani berbagai persoalan mendasar seperti tenaga, biaya, dan waktu dalam pengelolaannya. Upaya ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

pemantauan, serta evaluasi (Hawa & Valiant Salomo, 2020).

SPBE merupakan bentuk pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menuju *good governance* untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan menjadi lebih transparan, hemat biaya dan waktu, serta efisien dalam menanggapi kebutuhan publik (Hazid, 2022). Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah turut mengimplementasikan SPBE melalui berbagai aplikasi untuk memudahkan semua bentuk pelayanan melalui digital. Kementerian PANRB melaksanakan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan SPBE pada seluruh instansi pemerintah di setiap tahunnya untuk meninjau progres implementasi SPBE serta sebagai indikator pendukung penilaian SAKIP (Sistem Kinerja Instansi Pemerintahan).

Indeks SPBE Pemprov Tahun 2023

Instansi	Indeks SPBE	Predikat
Pemprov Jawa Tengah	4,26	Memuaskan
Pemprov D.I.Y Yogyakarta	4.22	Memuaskan
Pemprov DKI Jakarta	4.21	Memuaskan
Pemprov Jawa Barat	4.14	Sangat Baik
Pemprov Bali	4.07	Sangat Baik

Sumber: 1data.menpan.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih indeks tertinggi sebesar 4,26 dan predikat memuaskan. Capaian ini menghasilkan penghargaan *Digital Government Award* pada acara SPBE Summit tahun 2024. Indeks SPBE Jawa Tengah terus meningkat sejak tahun 2021 dan membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah telah mengintegrasikan data, layanan, serta aplikasi untuk memberikan dampak positif bagi pelayanan publik.

Kompleksitas kebutuhan akan pelayanan publik berdampak pada permintaan informasi serta data kredibel untuk berbagai kepentingan salah satunya melalui arsip karena arsip memberikan informasi yang lebih kredibel, tepat, dan otentik. Arsip merupakan sebuah rekaman kegiatan maupun peristiwa disajikan dalam media apapun sesuai dengan perkembangan TIK dan berdampak pada eksistensi organisasi utamanya organisasi publik dalam memberikan informasi terkait perencanaan di masa depan.

Pelayanan ketersediaan arsip telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) yang terpadu, sistemik, dan komprehensif guna menangani tantangan dalam sistem TIK. Peraturan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menteri Nomor 679 Tahun 2020 terkait Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dengan aplikasi yang ditetapkan yakni SRIKANDI. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar acuan pemberian layanan administrasi pemerintahan dengan basis elektronik.

Penetapan SRIKANDI sebagai AUBKD bertujuan untuk mendorong pelayanan administrasi pemerintahan utamanya dalam bidang kearsipan dinamis, mewujudkan persamaan dan keterpaduan dalam mengelola arsip dinamis berbasis elektronik, dan

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, serta transparan melalui penggunaan aplikasi pendukung SPBE terkait kearsipan dinamis pada seluruh instansi pemerintahan. Pedoman penerapan SRIKANDI sebagai aplikasi kearsipan dinamis juga telah tertuang dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.

SRIKANDI merupakan sistem informasi berbasis elektronik untuk mewujudkan sistem pemerintahan terintegrasi yang dapat digunakan bagi lembaga negara maupun pemerintah daerah berkaitan dengan kearsipan dengan seluruh arsip dan surat menyurat dapat terekam di jejak digital sehingga menjadi memori kolektif pendukung SPBE.

SRIKANDI memiliki 3 fitur utama yaitu fitur penciptaan arsip, fitur pemeliharaan arsip, dan fitur penggunaan arsip. Fitur penciptaan arsip meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas elektronik antar instansi pemerintah yang terhubung dalam SRIKANDI. Fitur pemeliharaan arsip menjadikan arsip tetap utuh dan kredibel. Fitur penyusutan arsip meliputi pemindahan serta pemusnahan arsip. Terdapat pula fitur penggunaan arsip bagi yang berhak dan setiap ASN diwajibkan memiliki akun SRIKANDI karena dapat merekam jejak kinerja ASN.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengembangkan aplikasi SRIKANDI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola serta Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pengawas.

Implementasi SRIKANDI diwajibkan bagi seluruh instansi pemerintah karena memiliki peranan penting untuk mewujudkan SPBE dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup nasional. Peningkatan big data terintegrasi secara nasional pada masing masing instansi daerah menjadi tujuan dari pengimplementasian SRIKANDI dengan harapan seluruh pengiriman naskah, pengarsipan, serta disposisi surat permohonan dapat terintegrasi hanya dalam satu aplikasi.

Menu Login SRIKANDI



Sumber: SRIKANDI (arsip.go.id)

Pedoman penerapan aplikasi SRIKANDI telah diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memudahkan, menertibkan, memastikan, dan mencapai efektivitas penyelenggaraan SRIKANDI pada seluruh instansi pemerintah. Penerapan SRIKANDI bertujuan untuk menjadikan pekerjaan lebih cepat selesai, peningkatan kinerja dan produktivitas, serta pekerjaan menjadi lebih mudah. Terdapat 3 indikator penerapan SRIKANDI berdasar pada Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 meliputi dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan dimensi sumber daya manusia. SRIKANDI juga membutuhkan beberapa aspek pendukung untuk diterapkan seperti sumber daya, tahapan penerapan, dan integrasi dalam SPBE.

Implementasi SRIKANDI telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan dimulai secara bertahap oleh ANRI dengan memberikan sosialisasi serta bimbingan teknis kepada Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat keputusan maupun surat edaran penggunaan aplikasi SRIKANDI pada setiap instansi pemerintah tanpa terkecuali. Sebagai peraih indeks SPBE tertinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut mengimplementasikan SRIKANDI sebagai aplikasi pengarsipan dan pengiriman naskah sesuai dengan surat edaran nomor 045/0011143 tentang Penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi dan bimbingan teknis diberikan kepada OPD Provinsi Jawa Tengah sesuai instruksi ANRI melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi *leading sector* implementasi SRIKANDI pada tingkat Pemerintah Provinsi.

Berada dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas penyokong penerapan SPBE atau menjadi pengelola *E-Government* pada tingkat daerah. Implementasi SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan bertahap sejak 1 Januari 2024.

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis



Sumber: diskominfo.jatengprov.go.id

Implementasi SRIKANDI secara terpusat untuk seluruh instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan dan persuratan. Skala kebijakan secara nasional tentu menjadikan pengimplementasian SRIKANDI mengalami berbagai permasalahan.

Implementasi kebijakan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan beberapa masalah dan adanya ketidaksesuaian dengan Pedoman Penerapan SRIKANDI. Permasalahan pertama yakni SRIKANDI kerap mengalami *trouble* dari pusat sehingga kegiatan pengarsipan dan persuratan menjadi tertunda. Hal ini menjadikan pegawai harus menunggu perbaikan dengan jangka waktu yang tidak tentu dan menjadikan pegawai mencari alternatif lain agar tetap dapat mengirim naskah maupun melakukan persuratan. Alternatif tersebut meliputi penggunaan kembali aplikasi TATAPRAJA untuk sementara waktu sampai SRIKANDI dapat digunakan kembali.

Aplikasi TATAPRAJA merupakan aplikasi e-office yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan surat, naskah, dan kearsipan dalam satu aplikasi sehingga

memudahkan dalam pembuatan, pengiriman, dan arsip pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini telah digunakan sejak tahun 2022 dan serupa dengan SRIKANDI. Seluruh surat maupun naskah yang dibuat di TATAPRAJA harus didata kembali pada SRIKANDI agar riwayat pengiriman dan pengarsipan dapat terekam dengan jelas.

Berdasar pra penelitian yang dilakukan peneliti dengan Ibu Riani Adi selaku Staf Divisi Program, penggunaan TATAPRAJA masih dilakukan sampai sekarang dan dinilai lebih efektif dari SRIKANDI pada awal implementasi SRIKANDI

Permasalahan berikutnya yaitu belum seluruh persuratan maupun naskah terintegrasi dalam SRIKANDI. Beberapa surat masih ada yang dilakukan secara manual baik dalam internal maupun eksternal instansi.

Rekapitulasi penggunaan SRIKANDI

Jenis Dokumen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Surat masuk	422	246	332	275	392
Surat keluar	100	66	67	71	84
Nota dinas	39	27	21	17	46
Total	561	339	420	363	522

Sumber : PPID diskominfo provinsi jateng (2024)

Detail Naskah pada Pemprov Jateng

Unit Kerja	Naskah Masuk	Naskah Keluar	Disposisi

Dinas Komunikasi dan Informatika	884	230	0
----------------------------------	-----	-----	---

Sumber : SRIKANDI (arsip.go.id)

Berdasarkan data naskah yang dilansir dari website SRIKANDI (arsip.go.id), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah memiliki naskah masuk sebanyak 884 naskah, naskah keluar sebanyak 230 naskah, dan belum memiliki disposisi. Hal ini menunjukkan bahwa surat, naskah, dan pengarsipan belum terintegrasi sepenuhnya dalam aplikasi SRIKANDI karena sistem SRIKANDI yang error dan tidak dapat diakses menjadikan pegawai tidak dapat melakukan input langsung pada sistem SRIKANDI.

Melihat permasalahan yang ada, peneliti memiliki ketertarikan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.”**

2. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan oleh instansi pemerintah (Siagian dalam Waluyo, 2007)

Harbani Pasolong (2019) menyatakan bahwa administrasi publik sebagai serangkaian aktivitas untuk menjalankan tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan publik melalui kerjasama antar kelompok maupun lembaga secara efisien dan efektif.

Implementasi Kebijakan

Sujana (2017) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kebijakan secara efektif. Definisi serupa dinyatakan pula oleh Widodo (dalam Sutojo, 2015) bahwa implementasi menjadi proses pencapaian tujuan sesuai yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang mana dalam penyelenggaraannya meliputi berbagai sumber daya (manusia, keuangan, dan kemampuan operasional) oleh pemerintah maupun pihak swasta serta kelompok maupun individu.

Model Implementasi Kebijakan

Edward III (dalam Daming dkk, 2021) menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor dalam implementasi, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sebagai bentuk penyampaian sasaran dan tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga perlu konsistensi dan kejelasan komunikasi dari pihak atas sampai bawah agar tidak ada perbedaan penafsiran, penyampaian informasi yang tepat serta akurat, serta penyampaian mekanisme dan aturan kebijakan untuk pelaksana.

2. Sumber daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan kebijakan ditunjang oleh kualitas serta kuantitas sumber daya yang ada. Sumber daya pendukung implementasi

kebijakan terdiri dari sumber daya manusia, dana, serta sarana prasarana.

3. Disposisi

Disposisi didefinisikan sebagai suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Aspek dalam struktur birokrasi meliputi pembagian kewenangan, struktur organisasi yang ditetapkan, serta hubungan antar unit organisasi baik secara internal maupun eksternal untuk melaksanakan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang terdiri dari kumpulan kata-kata, gambar, dan tulisan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan pengguna aktif SRIKANDI dan bertanggung jawab atas pengarsipan dan pengelolaan surat maupun naskah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tidak langsung, seperti catatan, buku, literatur, koran, dokumen, laporan, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan penerapan SRIKANDI. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data melalui

reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan SRIKANDI dan faktor penghambat implementasi kebijakan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

A. Implementasi Kebijakan SRIKANDI

Implementasi kebijakan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasar pada peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 terkait pedoman penerapan SRIKANDI dengan dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan dimensi sumber daya manusia.

1. Dimensi Teknologi

Dimensi ini berfokus pada kualitas informasi yang terdiri dari konten SRIKANDI yang dapat dipersonalisasi, relevan, lengkap, mudah dimengerti, dan aman, serta kualitas sistem meliputi kemudahan navigasi, ketersediaan, waktu respon, dan keamanan.

Kualitas informasi SRIKANDI telah sesuai dengan pedoman penerapan SRIKANDI karena konten yang ditampilkan telah memuat aspek personal, relevan, mudah dimengerti, dan aman meskipun pada awalnya terdapat penyesuaian karena peralihan dari aplikasi TATAPRAJA. Semakin berjalannya waktu, para informan merasakan kemudahan dalam menggunakan

SRIKANDI baik dari segi fitur maupun tampilan SRIKANDI.

Kualitas sistem SRIKANDI belum seluruhnya sesuai dengan pedoman penerapan SRIKANDI. Informan memaparkan merasakan adanya kemudahan navigasi meskipun mengalami kesulitan pada awalnya. Ketersediaan SRIKANDI tidak selalu ada ketika dibutuhkan karena kerap kali mengalami kendala teknis dan tidak bisa diakses sama sekali. SRIKANDI juga tidak cepat merespon ketika diakses. Pada indikator keamanan, SRIKANDI sudah aman untuk melakukan pengarsipan dan pengiriman surat namun keamanan situs masih tergolong lemah karena pernah diretas dan menyebabkan hilangnya data.

2. Dimensi Organisasi

Dimensi ini berfokus pada dukungan internal instansi untuk mendorong penerapan SRIKANDI meliputi dukungan pimpinan dan fasilitasi penerapan SRIKANDI.

Dukungan pimpinan merupakan lingkungan kerja yang merefleksikan sejauh mana pimpinan mendukung penggunaan SRIKANDI pada instansi ditinjau dari penggunaan sistem, evaluasi sistem, dukungan, dan implementasi. Seluruh indikator pada dukungan pimpinan telah sesuai dengan pedoman penerapan SRIKANDI karena pimpinan selalu memantau tingkat penggunaan SRIKANDI melalui akun pribadi SRIKANDI, pimpinan

memperhatikan kendala atau permasalahan dalam SRIKANDI melalui koordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, pimpinan menyediakan dukungan dana untuk operasional kebutuhan SRIKANDI, dan pimpinan memberikan perhatian pada kinerja SRIKANDI dengan bertanya secara langsung kepada pegawai terkait kendala dalam penggunaan SRIKANDI.

Fasilitasi penerapan SRIKANDI merupakan infrastruktur organisasi serta fasilitas teknis dari instansi guna mendukung penggunaan SRIKANDI meliputi kemampuan, pemberdayaan akses, pengetahuan, dan dukungan yang memadai. Indikator fasilitasi penerapan SRIKANDI telah sesuai dengan pedoman penerapan kecuali indikator dukungan yang memadai. Instansi telah menyediakan fasilitas penunjang SRIKANDI seperti perangkat komputer dan koneksi internet, memberikan kemudahan akses peralatan kantor untuk menggunakan SRIKANDI, memberikan bimbingan teknis kepada pegawai terutama pengguna aktif agar memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan SRIKANDI, terdapat arsiparis dan staf ahli membantu ketika SRIKANDI terkendala namun perlu dibuat juknis maupun SOP karena terdapat beberapa mekanisme berbeda yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan di instansi.

3. Dimensi Sumber Daya Manusia

Dimensi ini erat kaitannya dengan aspek SDM untuk mendukung penerapan SRIKANDI meliputi pelatihan pengguna SRIKANDI, kepercayaan individu, serta penerimaan pengguna SRIKANDI.

Pelatihan pengguna SRIKANDI merupakan layanan bagi pengguna untuk melaksanakan tugasnya meliputi ketersediaan, dukungan, dan efektivitas hasil pelatihan. Instansi telah menyediakan pelatihan pengguna SRIKANDI melalui bimbingan teknis penggunaan SRIKANDI pada 30 Oktober 2023 dan bimbingan teknis pelatihan penggunaan SRIKANDI pada 11 Januari 2024. Instansi juga menyediakan dukungan dengan pemberian materi latihan memadai dan adanya dukungan IT setelah pelatihan. Efektivitas hasil pelatihan dirasakan oleh pengguna karena diberikan pengetahuan melalui bimtek sehingga pengguna terampil menggunakan SRIKANDI.

Kepercayaan individu merupakan kapasitas individu untuk mempengaruhi perilaku dalam menggunakan SRIKANDI terdiri dari pengalaman diri dan kemampuan diri. Pengalaman diri berupa kenyamanan telah dirasakan oleh pengguna karena fitur dan tampilan SRIKANDI memudahkan pengguna menyelesaikan pekerjaannya melalui SRIKANDI. Pada kemampuan diri, pengguna telah mampu mengoperasikan SRIKANDI tanpa bantuan dari orang lain. Penerimaan pengguna SRIKANDI, pengguna

turut merasakan bahwa arsip merupakan bagian penting dari instansi dan menjadi tanggung jawab bersama dan pengelolaan arsip mencerminkan bagaimana kinerja dan akuntabilitas sebuah instansi.

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan SRIKANDI

Peneliti akan menganalisis faktor dari implementasi kebijakan SRIKANDI berdasar teori George Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sebagai kegiatan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi sudah berjalan dengan baik karena di awal penerapannya, terdapat pembekalan dari bimbingan teknis terkait kebijakan SRIKANDI dan sampai saat ini tetap berkoordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ketika SRIKANDI terkendala. Kejelasan komunikasi turut dirasakan oleh pengguna karena setiap informasi selalu disampaikan dari pimpinan kepada pegawai.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan kebijakan didukung dari kualitas serta kuantitas sumber daya memadai. Sumber daya pendukung implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana prasarana. Sumber daya manusia telah

mendukung implementasi kebijakan SRIKANDI karena pegawai telah mampu dan terampil menggunakan SRIKANDI untuk keperluan dinas. Aspek keuangan telah tersedia dan mendukung implementasi kebijakan SRIKANDI untuk kebutuhan operasional SRIKANDI. Sarana prasarana sudah memadai dan mudah diakses oleh seluruh pengguna ketika akan menggunakan SRIKANDI.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap implementor berupa keinginan, kemauan, dan kecenderungan untuk mengimplementasikan SRIKANDI dan terwujud dalam komitmen serta kejujuran. disposisi telah terlaksana sesuai dengan arahan ANRI melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Para pegawai telah memahami dan terampil menggunakan SRIKANDI untuk mengirim naskah, surat, dan mengelola arsip dinamis. Respon pegawai untuk implementasi kebijakan SRIKANDI ditunjukkan dengan sikap dan komitmen yang menggunakan SRIKANDI secara efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan antar unit dalam organisasi. Menurut Edward III dalam struktur birokrasi dibagi menjadi SOP (*Standard Operating Procedure*) dan *fragmentation* (tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi) serta pada kejelasan struktur organisasi, kejelasan

pembagian kewenangan, dan hubungan antar unit dalam instansi.

Faktor struktur birokrasi sudah berjalan meskipun terdapat indikator yang belum terlaksana. Dari segi kejelasan struktur birokrasi, implementasi SRIKANDI telah memiliki struktur yang jelas siapa pengelola dan penanggung jawabnya. Namun tidak terdapat SOP maupun tekanan dari unit lain terkait penggunaan SRIKANDI. Dari segi pembagian kewenangan telah terlaksana karena dibagi secara struktural dan didasarkan pada pembentukan ketika bimbingan teknis. Dari segi hubungan antar unit instansi sudah terlaksana karena terdapat koordinasi ketika menggunakan SRIKANDI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- Implementasi kebijakan SRIKANDI pada dimensi sumber daya manusia telah sesuai dengan Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan SRIKANDI tetapi tidak sesuai pada dimensi teknologi karena SRIKANDI tidak selalu sedia, lamanya waktu respon, dan keamanan masih rentan terhadap cyber dan dimensi organisasi dengan satu indikator tidak sesuai yaitu dukungan yang memadai karena belum adanya SOP yang

mengatur mekanisme dan kewenangan lebih terperinci.

- Teori implementasi kebijakan oleh Edward III didasarkan pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Faktor struktur birokrasi merupakan faktor penghambat karena belum terdapat SOP yang mengatur pelaksanaan SRIKANDI sehingga penerapan SRIKANDI masih terdapat beberapa kendala serta belum terperincinya teknis pelaksanaan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah peneliti jabarkan, terdapat kendala dalam implementasi kebijakan SRIKANDI. Adapun saran yang peneliti dapat berikan sebagaimana berikut:

1. Memperkuat dan mengembangkan sistem informasi SRIKANDI agar minim trouble disertai kesesuaian dengan kebutuhan user di daerah berupa peningkatan keamanan dan pemsifan penggunaan SRIKANDI versi terbaru.
2. Membuat SOP penggunaan SRIKANDI agar teknis dan mekanisme SRIKANDI lebih jelas untuk dilaksanakan dan disesuaikan dengan keadaan instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. (2003). Psikologi Umum. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 151.
- Aristriya, D., dan Tuswoyo. (2024). Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI) Sebagai Upaya Mitigasi Arsip Kebencanaan. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Vol 11. No. 2.
- Aswini, M. E., dan I Nyoman Subanda. (2020). Implementasi Sistem Kearsipan Elektronik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. *Media Bina Ilmiah*. Vol. 14. No. 8.
- Damanik, M. P., dan Erisva H. P. (2017). E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 21. No. 2.
- Daming, M. A., Agustang, A., Idhkan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 5. No. 4.
- Dasnoer, H., dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9. No. 16.
- Dewi, B. P. (2020). Penerapan Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*. Vol. 7. No. 4.
- E. Widjo Hari Murdoko. (2006). *Personal Quality Management*. Penerbit:PT Elex Media Komputindo.31-33.
- Handayani, T. A. (2023). Dimensi Disposisi atau Sikap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Binapatria*. Vol. 18. No. 4.
- Hadijah, dan Aulia Rahman. (2024). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* . Vol. 7. No. 2.
- Hawa, P., & Valiant Salomo, R. (2020). Readiness of Digitalization Services for Electronic Based Government Systems in Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT). *Restorica*, 6(1), 1–13.
- Hazid, J. (2022). Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Iqbal, M., dkk. (2024). Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dalam Upaya Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di Sekretariat Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*. Vol. 10. No. 2.
- Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*. Vol. 9. No. 2. Hal. 115–124.
- Nirwana, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Informasi*,

- Perpustakaan, dan Kearsipan*. Vol. 24. No. 2.
- Noor, A.S.S.P, dkk. (2023). Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Komunikasi Tertulis Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat. *Manajerial : Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*. Vol. 22. No. 2.
- Nurhafni, dkk. (2025). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*. Vol. 6. No. 1.
- Kartini Kartono. (1996). Psikologi Umum. Bandung: CV. Mandar Maju. Hal. 102.
- Keban, Yeremias T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Rachmad, Y. E., dkk. (2024). Layanan dan Tata Kelola E-Government (Teori, Konsep, dan Penerapan). Yogyakarta : PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rahmi, R. Z. (2023). Implementasi Aplikasi Srikandi dalam Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman. Tugas Akhir Universitas Negeri Padang.
- Ritonga, A. H. Implementasi Kebijakan Aplikasi SRIKANDI dalam Pengelolaan Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Repositoryipdn.
- Sasmito, E. E. (2022). Percepatan Implementasi “Srikandi” di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi.
- Satria, B.A. (2024). Implementasi Pemerintahan Digital Melalui Aplikasi SRIKANDI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *KNIA 8.0*. Vol. 8. No. 1.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subkhan, A. (2022). Implementasi Srikandi dengan Template Kearsipan di Badan Karantina Pertanian. Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi.
- Suepa, M. (2024). Pengimplementasian Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang. *PROSIDING*. Vol. 1.
- Tahir. (2014.) *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, Y., dkk. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Action Research Literate*. Vol. 8. No. 4.
- Yogopriyanto, J., dkk. (2024). Kesiapan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kota Bengkulu. *Jurnal Administrasi dan Kesekretariatan*. Vol. 9. No. 1.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Kesepuluh)*. Media Nusa Creative.